

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sisi efektivitas, pengelolaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta menunjukkan kinerja yang sangat baik sepanjang periode 2020–2024, dengan rata-rata efektivitas mencapai 121,02%. Setiap tahun capaian selalu melampaui target, bahkan pada 2020 mencapai 135,84% meski kondisi pandemi. Namun, terjadi penurunan efektivitas bertahap hingga 107,07% pada 2024, terutama akibat kurangnya mobilitas masyarakat serta kurangnya pengawasan terhadap juru parkir dan pengelola parkir.
2. Dari sisi kontribusi, retribusi parkir di Kota Yogyakarta selama periode 2020–2024 belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 0,80%. Meskipun nominal penerimaan retribusi parkir cenderung meningkat setiap tahun, persentase kontribusinya tetap berada di bawah 1% dan masuk dalam kategori tidak berkontribusi. Hal ini mencerminkan bahwa sektor retribusi parkir belum menjadi sumber utama penggerak Pendapatan Asli Daerah, dan perannya masih sangat terbatas dalam menopang pendapatan daerah secara keseluruhan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta  
Untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi parkir di Kota Yogyakarta, disarankan agar Dinas Perhubungan terkhususnya bagian perpajakan dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan

hukum bagi juru parkir dan pengelola parkir. Pemanfaatan teknologi terkini, seperti aplikasi seluler untuk pembayaran dan monitoring parkir, juga dapat memperlancar proses dan mempermudah pengguna. Edukasi publik mengenai pentingnya membayar retribusi parkir perlu digencarkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan.

## 2. Peneliti selanjutnya

Saran sebaiknya melakukan analisis data yang lebih komprehensif dan studi komparatif dengan kota lain yang sukses dalam hal pengelolaan parkir. Hasil analisis tersebut kemudian dapat dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang spesifik, sehingga Dinas Perhubungan dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efektif.